

**SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
KECAMATAN SIJUNJUNG**

**Oleh :**

**Anggella Yanesa**

Email : yanessa.anggela@yahoo.com

**Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri S.Sos, M.Si**

Jurusan Administrasi Negara-Prodi Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Given the tremendous amount of waste generated per day would need to be an attempt to address the problem, the Government Sijunjung District of Sijunjung make a socialization to overcome the problem, namely the Regional Regulation No. 08 of 2013 on the management of waste that aims to improve public health and environmental quality and to utilize waste as a resource. Trash that are produced by the District Sijunjung community is for household waste or household with a percentage of 77.89% of organic waste is carried out 2-4 times a day to transport it to the landfill.*

*The purpose of this study were (a) to identify and analyze the socialization of implementation of Regional Regulation No. 08 of 2013 concerning waste management in Sijunjung, (b) to determine and describe the factors that become an obstacle to the socialization of the implementation of the Regional Regulation No. 08 of 2013 on waste management in Sijunjung. This research was conducted at the Environment Agency Sijunjung who socialize regulation No. 08 of 2013 on waste management, accordance with the object mentioned above, the necessary data technique election informants in this research is purposive sampling, while the informants in this study is as follows: Head of the Environment Agency, Section of Environment, Head of Environmental Degradation Control, Sub Division of Administration, the District Public Sijunjung Sources of data in this study are primary data and secondary data. For the technique of data collection was done by interview, observation and literature study. Methods of data analysis used in this study is a qualitative descriptive analysis.*

*From the results of research on the area of socialization Regulations No. 8 of 2013 on Waste Management, especially in Sub Sijunjung seen from the aspect of communication, resources, attitude or disposition as well, bureaucratic structure. The obstacles encountered in the implementation of the socialization of Bylaw No. 8 of 2013 on Waste Management in Sub Sijunjung among others: (a) lack of ability and profesionalisme human resources to carry out the implementation of waste management, (b) the lack of facilities and infrastructure that support the implementation of waste management, (c ) lack of employee attitudes for interaction, communication and coordination between authorities in conducting waste management, (d) lack of coordination, performed the Environment Agency with other relevant agencies*

**Keywords:** Socialization, Bylaw No. 8 of 2013 On Waste Management

## PENDAHULUAN

Volume sampah di Kecamatan Sijunjung. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2015 menurut Badan Lingkungan Hidup, sampah yang dihasilkan per harinya mencapai sekitar 90,44 m<sup>3</sup>/hari dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 28,52m<sup>3</sup>/hari dengan daya tampung TPA sekitar 61,92 m<sup>3</sup>/hari. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per harinya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah tersebut.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung Kecamatan Sijunjung membuat suatu sosialisasi untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Sijunjung adalah sampah permukiman atau rumah tangga dengan persentase sebesar 77.89% sampah organik yang pengangkutannya dilaksanakan 2-4 kali sehari menuju TPA. Pengurangan sampah termasuk pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah di Kabupaten Sijunjung Kecamatan Sijunjung saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan dengan baik. Hal tersebut karena masih kurangnya TPA di Kecamatan Sijunjung, Hal ini dikarenakan pembatasan jumlah timbulan sampah harus berasal dari sumber sampah dan pemerintah hanya sebagai

fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam hal pembatasan sampah tersebut. Dalam mengurangi jumlah timbulan sampah DKP mendirikan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang ada sekitar 15 TPST yang aktif beroperasi di Kecamatan Sijunjung.

Permasalahan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Sijunjung lainnya disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sijunjung. Hal itu dijelaskan oleh Badan Lingkungan Hidup bahwa keterbatasan tenaga harian lepas yang dimiliki oleh DKP dan angkutan yang minim membuat sistem pengangkutan sampah tidak maksimal. Se jauh ini, dari pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten / Kota dituntut untuk dapat mengelola sampah dengan baik dan dikembalikan secara aman pada lingkungan serta tidak membahayakan kelestarian lingkungan maupun manusia. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Dalam penelitian ini, sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah secara umum dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup sasarannya kepada masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sijunjung karena di daerah Sijunjung sendiri masih banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan benar, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang bisa daur ulang kembali sehingga menjadi hasil karya lagi. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sijunjung, supaya meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tersebut.

Kecamatan Sijunjung memiliki 14 Kenegarian/Kelurahan. Masalah persampahan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung terutama di Kecamatan Sijunjung masih terbilang cukup besar, walaupun pada dasarnya Kecamatan Sijunjung terletak di ibukota Kabupaten Sijunjung, akan tetapi masih banyak terlihat kurangnya pengelolaan sampah dilihat dari beberapa fenomena dibawah ini :

1. Kurangnya tempat penampungan sampah, keterlambatan pengambilan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya membuat banyaknya sampah berserakan dan tertumpuk di sejumlah tempat di Kecamatan Sijunjung
2. Tidak adanya penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
3. Kurangnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan belum

adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang maksimal karena Kabupaten Sijunjung dalam hal ini hanya memiliki 2 (dua) unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Muaro Batuk Kecamatan Sijunjung dan di Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Kapasitas TPA tersebut terbatas, tidak mampu menampung sampah di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung. Adapun TPS di Kecamatan Sijunjung terdiri dari bak sampah permanen yang berjumlah 7 unit dan bak continier 12 unit.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut, maka yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana sosialisasi Peraturan Daerah No 08 tahun 2013 mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah no 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung?

### **Tujuan dan manfaat penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah No 08 tahun 2013 mengenai tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat

sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah no 08 tahun 2013 mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan demikian pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif lebih relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sehingga keluar Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2013 ini, sehingga penulis rasa sangat menarik untuk dikaji dan diangkat menjadi judul dalam skripsi ini.

### **2. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung yang mensosialisasikan perda no 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Adapun di Kecamatan Sijunjung yang menjadi sasaran, dikarenakan di Kecamatan Sijunjung yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi. Penentuan Lokasi tersebut diambil berdasarkan pada dua pertimbangan, pertama bahwa tempat tersebut adalah angka kepadatan penduduk tertinggi. Kedua karena merupakan tempat sumber data lengkap tentang pengelolaan sampah.

### **3. Informan Penelitian**

Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini

dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu peneliti menunjuk langsung orang-orang yang peneliti anggap mengetahui informasi yang diperlukan dalam penelitian ini (Bungin, 2007: 21). Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan yang dibutuhkan dalam kaitan dengan Bank Sampah.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup
2. Seksi Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Sub Bagian Tata Usaha
4. Masyarakat Kecamatan Sijunjung

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Pada penulisan ini menggunakan jenis data primer dan sekunder yang dianggap penulis mampu untuk mendukung penulisan ini.

- a. Data primer
- b. Data sekunder

### **5. Teknik pengumpulan data**

Penulisan ini merupakan penulisan lapangan yaitu penulisan secara langsung kepada sumber yang diteliti. Dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik yang dipergunakan pada penulisan ini yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

## 6. Teknik Analisis data

Penulis ini menggunakan data kualitatif. Setelah semua data dikumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, maka hasil data tersebut disajikan dalam bentuk kutipan wawancara. Kemudian dianalisis seluruh jawaban yang diperoleh dari responden sehingga dapat dideskripsikan dalam penulisan sesuai dengan teori untuk ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, pada Bab I pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Tahap sosialisasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh pembuat kebijakan, namun tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. Studi implementasi lebih menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan atau kegagalan sosialisasi suatu program dapat dilihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasikan sosialisasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya

misi program dengan didukung oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi-organisasi dari tingkat atas sampai pada level bawah.

Melalui proses sosialisasi warga masyarakat belajar memahami dan mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan selanjutnya masyarakat akan dapat saling menyerasikan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi sosial. Sosialisasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar sebuah kebijakan yang telah dibuat dapat diketahui masyarakat, dipahami dan dapat diaplikasikan ditengah – tengah aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai dengan baik. Untuk mensosialisasikan suatu kebijakan, maka diperlukan sebuah perencanaan agar sosialisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara tatap muka tetapi juga bisa dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, surat menyurat, bisa juga berlangsung secara formal dan informal, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sosialisasi juga dapat dilakukan demi kepentingan orang yang melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan bisa sepadan atau bertentangan. Terkait sosialisasi sedikit banyaknya kita tidak bisa terlepas dari satu bentuk tindakan pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang telah dibuat dan ditentukan tujuan pembuatannya, dalam penyampaian hendaknya dapat diaplikasikan dengan sebaik mungkin dan dengan seoptimal mungkin terhadap objek sehingga

kebijakan tersebut tidak menjadi sesuatu yang sia – sia.

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa sosialisasi Peraturan Daerah no 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung. Maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

### **1. Komunikasi (*communication*)**

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh *Edward III* termasuk kepada tipe komunikasi vertikal.

Untuk mendapatkan komunikasi yang baik diperlukan aturan-aturan yang berlaku dalam proses penyampaian informasi yang maksimal pula. Persoalan pokok yang menyangkut informasi bagi pimpinan kepada bawahan adalah bagaimana memanfaatkan informasi-informasi yang beraneka ragam untuk kepentingan organisasi, bagaimana memanajemeni informasi sehingga bermanfaat bagi peningkatan organisasi dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan suatu sistem berupa komunikasi yang dapat diandalkan dalam menyampaikan informasi dari pimpinan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi dan pembuat keputusan, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang efisien.

Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan dan perbedaan pengertian ini disebabkan persepsi orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

Komunikasi merupakan proses pemberian informasi secara timbal balik dari pihak satu kepada pihak lainnya. Selanjutnya proses komunikasi tersebut pada dasarnya ada lima macam yaitu; laporan, inspeksi, jaringan hubungan pribadi, penyelidikan dan sentralisasi kegiatan. Dengan terjalannya komunikasi dalam organisasi diharapkan dapat menciptakan efisiensi kerja pegawai. Komunikasi dalam organisasi terkadang kurang dimengerti dengan jelas sehingga menimbulkan beberapa hambatan. Komunikasi tidak sekedar penyampaian informasi yang simbol-simbolnya dapat dilihat, didengar dan dimengerti tetapi proses penyampaian informasi secara keseluruhan termasuk perasaan dan sikap orang yang menyampaikan informasi tersebut.

Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian warta/ berita/ informasi yang mengandung arti dari suatu pihak(seseorang atau tempat), kepada pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian penyampaian informasi dan pengertian melalui symbol-simbol umum baik verbal maupun nonverbal.

Komunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:



1. Proses Sosial, dimana ketepatan komunikasi dapat dipengaruhi oleh proses social seperti norma yang lazim berlaku dalam jabatan dan status hierarki dalam organisasi.
2. Proses persepsi seseorang, dimana penerimaan seseorang atas instruksi atasannya dapat dipengaruhi oleh opininya mengenai atasan tersebut, kadar sifat kontroversinya atau ancaman pemerintah tersebut.
3. Sifat dan struktur organisasi itu sendiri. Jika berita harus melalui beberapa tingkatan dalam hierarki organisasi. Kemungkinan besar terjadi pemutar balikan berita dan mengakibatkan timbulnya masalah seharusnya dapat dihindari jika komunikasi dapat dilakukan dengan bertemu muka.

Jadi komunikasi yang dimaksud disini merupakan pengiriman atau penyampaian perintah-perintah dan arahan-arahan atau informasi-informasi yang bertujuan menghasilkan dampak. Kejelasan perintah dan arahan mengandung maksud dan kekhususan tentang apa yang harus dihasilkan oleh para pelaksana dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Komunikasi yang tidak cukup juga memberikan implementor dengan kewenangan ketika mereka untuk membalik kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan khusus. Kewenangan ini tidak akan perlu dilakukan untuk memajukan tujuan para pembuatan keputusan aslinya. Dengan demikian perintah-perintah implementasi tidak ditransmisikan. Yang terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak

pasti atau tidak konsisten mendatangkan rintangan-rintangan serius bagi implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Bapak Drs. Syukri, MM disebutkan bahwa ;

*"Dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung khususnya di Kecamatan Sijunjung, terdapat koordinasi secara teknis fungsional dan teknis operasional yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kebersihan, Selanjutnya beliau mengatakan koordinasi dilakukan pada apabila ada lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab badan belum dilaksanakan seperti pembersihan jalan dan pembersihan gorong-gorong baik pihak Badan Lingkungan Hidup yang melibatkan masyarakat Kecamatan Sijunjung"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Lingkungan Hidup Bapak Veri Satria, SE disebutkan bahwa :

*"Dalam menciptakan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung memerlukan komunikasi dua arah antar sesama pegawai, dengan adanya komunikasi maka masing-masing personal dapat saling menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan"*

*terutama pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah namun saat ini masih kurangnya informasi karena kurangnya kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat kurang memahami pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sijunjung Bapak Hasan Basri disebutkan bahwa :

*“Sebaiknya Badan Lingkungan Hidup melibatkan Camat., Lurah Ketua RT, RW dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, bahwa masalah kebersihan bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama sehingga timbul kesadaran masyarakat bersama-sama membudayakan membuang sampah pada tempatnya”.*

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Bapak Masrul Solundra adalah sebagai berikut :

*“ Menurut saya, kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan pemerintah, bahkan saya sering mendengar laporan adanya tumpukan sampah dijalanan karena masyarakat kurang peduli untuk ikut mengelola sampah. Dan menurut saya komitmen pemerintah daerah masih kurang, dalam hal mengelola sampah terutama anggaran yang diperuntukan menambah*

*armada untuk pengangkutan sampah”.*

Dari hasil analisis observasi yang peneliti laksanakan masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi yang jelas mengenai pengelolaan sampah yang baik seperti memisahkan sampah organik dan sampah non organik sehingga banyak juga masyarakat yang enggan mengelola sampah rumah tangganya dengan melakukan pemilahan sampah, hal ini tentunya berpengaruh pada pengangkutan sampah yang dilakukan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari aspek komunikasi berada pada kategori masih kurang terlaksana, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengelolaan sampah apalagi pemerintah daerah tidak ada membuat spanduk atau baliho tentang pengelolaan sampah yang baik.

## **2. Sumber daya**

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai , maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mensosialisasikannya. Sumberdaya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas



yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

Sumber daya manusia kini semakin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital dalam organisasi. Sumber daya manusia merupakan orang yang bekerja dibawah organisasi dengan suatu sistem kegiatan yang terkoordinir dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dibawah suatu kekuasaan dan kepemimpinan, maka keberhasilan karyawan dalam menjalankan fungsinya juga ditentukan oleh keberhasilan organisasi memenej karyawan tersebut.

Untuk itu dibutuhkannya sumber daya dalam pengisian jabatan dalam suatu organisasi. Proses ini meliputi masalah penentuan kebutuhan dari sumber tenaga kerja manusia, sampai pada penempatannya yang diperlukan tahapan-tahapan yang tentunya mulai dari jumlah yang dibutuhkan sampai pada proses penempatan seorang karyawan tersebut.

Di Badan Lingkungan hidup sumber daya yang dimiliki

bersumber dari kondisi dana, fasilitas dan manusia. Dana dan fasilitas diberikan dan diperlukan dalam pengelolaan sampah terutama di Kecamatan Sijunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Staff di Badan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa ;

*"Dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah pada Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh aparat Badan Lingkungan Hidup sejauh ini aparat dinilai kurang konsisten dalam melakukan pengelolaan sampah ini dibuktikan dengan banyaknya tumpukan sampah hampir di setiap sudut jalan di Kecamatan Sijunjung".*

Berdasarkan hasil wawancara dengan RT 011 yang ada di Kecamatan Sijunjung disebutkan bahwa ;

*"Kurangya konsistensi aparat dalam melaksanakan tugas pemungutan tumpuksn sampah pada Kecamatan Sijunjung oleh petugas kebersihan sejauh ini pihak masyarakat tidak mengetahui dengan jelas jadwal pemungutan sampah oleh petugas lapangan sehingga masyarakat meletakkan sampah-sampah rumah tangganya tidak terjadwal".*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang ada di Kecamatan Sijunjung disebutkan bahwa ;

*"Sejauh ini pihak Badan Lingkungan Hidup tidak ada melakukan penginformasian*

*jadwal pengambilan sampah ke tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui jadwal pengambilan sampah yang sebenarnya, hal ini mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan Kecamatan Sijunjung karena, sampah-sampah tidak terangkut sesuai jadwal pengangkutan”.*

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Bapak Noprizal disebutkan bahwa :

*“Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sijunjung, melimpahkan kewenangan pengelolaan kebersihan kepada Badan Lingkungan Hidup disertai juga anggaran pengelolaan kebersihan yang cukup besar yakni lebih kurang 500 juta, tergantung apakah pihak Badan Lingkungan Hidup bisa memenej dengan baik anggaran yang disedia tersebut”*

Dari hasil analisis data hasil observasi lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya yang di Badan Lingkungan Hidup sudah diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan sampah, namun permasalahannya mengenai kurang pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan sumberdaya dalam hal ini kemampuan sumberdaya aparat dalam melaksanakan pemungutan dan pengambilan sampah yang belum tepat waktu sehingga masih terdapat sampah-sampah pada TPS yang belum terangkat, dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup ke pada

masyarakat mengenai jadwal pemungutan sampah oleh petugas operasional.

### **3. Disposisi/Sikap**

Disposisi sikap para pelaksana yaitu persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistim nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya. Sikap merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Sikap dapat membantu individu untuk berinteraksi dan berfikir secara matang, adanya kemampuan bersikap menjadikan kepribadian seorang pegawai mampu menangani tanggung jawab untuk masa yang akan datang meskipun tidak berhubungan dengan jabatan yang sedang dilakukan atau juga jabatan yang akan datang. Pengembangan sikap ini diharapkan dapat membantu individu pegawai agar mampu mempertajam daya peka, kecepatan reaksi dan mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai macam masalah yang timbul. Sikap bagi pegawai dapat menuntun perilaku pegawai lebih perhatian kepada produktivitas kerja dan perhatian kepada setiap orang sehingga intensitas pelaksanaan pekerjaan dapat mencapai hasil yang maksimal. Selain itu sikap atau disposisi juga berhubungan dengan kepribadian, kemauan, komitmen yang dijalankan serta cara pandang seseorang dalam menghadapi suatu kebijakan.

Sebagai pemimpin yakni kepala Badan Lingkungan Hidup harus memiliki watak dan

karakteristik yang dimiliki oleh seorang sosiolog, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaku sosialisasi memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaku sosialisasi memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses sosialisasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kepala Badan memiliki fungsi terhadap dua sasaran yaitu memotivasi masyarakat dan memotivasi bawahannya. Sebagai pemimpin, Kepala BLH harus memiliki kemampuan memilah dengan bijaksana antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individual dalam kepentingan bersama. Pimpinan harus sering turun ke masyarakat dalam berbagai kondisi masyarakat agar dapat mendengar dan merasakan apa yang diinginkan masyarakat. Karakter dan sikap pimpinan terhadap hak, wewenang dan kewajiban dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, akan memberikan dampak kepada organisasi yang terkendali melalui pendekatan struktural dan prosedural yang dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat seiring dengan tugas dan fungsinya yang melekat dengan organisasi. Inilah yang diakui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup belum berjalan dengan baik, karena selama ini pelaksanaan tugas yang dilakukan aparat dalam pengelolaan sampah dilakukan tidak secara struktural dan prosedural tetapi lebih bersifat sesuai keperluan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Bapak Drs. Sukri MM disebutkan bahwa ;

*"Dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah pada Kecamatan Sijunjung sejauh ini semua pihak saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah pegawai harus memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Tata Usaha Badan Lingkungan Hidup Bapak A. Syuhaiyar Arief disebutkan bahwa ;

*"Untuk menunjang pengelolaan sampah setiap masyarakat dikenakan retribusi sampah. Dalam pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Sijunjung sejauh ini sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran belum diterapkan (tidak membayar retribusi), sehingga masyarakat tidak takut terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung".*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan Sijunjung Bapak Syamsudin disebutkan bahwa ;

*"Pihak Badan Lingkungan Hidup jarang memberikan sosialisasi berupa pengarahan*

*kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pengarahan yang dilakukan tidak perlu turun langsung ke lapangan, pihak Badan Lingkungan Hidup dapat membuat spanduk atau selebaran untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan Sijunjung Ibu Hanifah disebutkan bahwa ;

*“Sejauh ini, kalau saya lihat penerapan sanksi bagi masyarakat belum dilaksanakan, karena hal ini tidak terlepas dari pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup dan juga sanksi sosial yang menurut pendapat saya yang sama-sama disadari masyarakat adanya budaya malu untuk membuang sampah pada tempatnya”*

Dari hasil analisis data hasil observasi disimpulkan bahwa disposisi atau sikap aparat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan sampah sudah dilaksanakan, namun permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan masih terjadi karena :

- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Badan Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah melalui spanduk atau selebaran.
- Tidak terlaksananya penerapan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dalam rangka peningkatan mutu struktur birokrasi dalam pelayanan publiknya diperlukan perubahan birokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Birokrasi harus terus menerus memperbaiki kinerjanya agar tercipta birokrasi yang handal produktif, kompetitif, reprehensive dan Akuntabel. Oleh karena itu, birokrasi harus mengoreksi dan mereduksi kelemahan masa lalu dan masa mendatang secara terus menerus.

Dalam pelaksanaan kegiatan antar organisasi dengan organisasi atau badan lainnya terjadi hubungan. Alur hubungan Pemerintah Kabupaten dalam paradigma lama adalah secara vertikal dan horizontal artinya Badan Lingkungan Hidup sebagai bawahan Bupati, namun kondisi saat ini komunikasi yang dibangun masih belum mampu meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung secara maksimal. struktur birokrasi yang dimaksud terkadang tidak mengedepankan keseragaman kerja organisasi dan kurangnya tanggung jawab aparat dalam mencapai hasil kerja yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Tata Usaha Badan Lingkungan Hidup Bapak A. Suhaiyar Arief disebutkan bahwa ;

*”Setiap pegawai memiliki masing-masing tugas yang telah ditetapkan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat struktur organisasi yang menetapkan masing-masing tugas dari pegawai, dengan adanya pembagian kerja (job*

*description) tersebut maka pegawai sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, sehubungan dengan target pengelolaan sampah yang ditetapkan maka semua pihak yang berkompeten perlu menjalankan tugas dengan maksimal agar pengelolaan sampah yang ditetapkan dapat tercapai”.*

Berdasarkan wawancara Kepala seksi Lingkungan Hidup Bapak Veri satria disebutkan bahwa :

*”Setiap organisasi memiliki program dan target kerja yang direncanakan sebelumnya, masing-masing aparat harus profesional dalam menjalankan tugas yang ditetapkan, menjalankan prosedur kerja untuk menghasilkan keseragaman kerja pada Badan Lingkungan Hidup terutama dalam mencapai pengelolaan sampah dan berjalannya pengelolaan kebersihan yang ditetapkan”.*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Bapak Noprizal disebutkan bahwa :

*“ Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tanggungjawab pencapaian pengelolaan sampah yang ditetapkan, kedepan sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah berdasarkan jumlah volume sampah yang dihasilkan, sehingga diharapkan tahun depan pengelolaan sampah yang lebih baik sudah bisa*

*diharapkan, terealisasi dan dapat terpenuhi, selain hal tersebut anggaran operasional akan di tetapkan dan ditambah sesuai kebutuhan operasional di lapangan”.*

Dari hasil analisis data observasi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi berada pada kategori kurang terlaksana, karena kurang sosialisasi yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan baik dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, maka dalam menjalankan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terdapat beberapa faktor penghambat antara lain ;

1. Sumber Daya Manusia

Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam hal ini aparat dari Badan Lingkungan Hidup untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan informasi sehubungan pengelolaan sampah agar berjalan dengan baik dan maksimal dan menanamkan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Sijunjung.

2. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki terutama armada operasional di lapangan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah karena sarana dan prasarana merupakan bahan penunjang pelaksanaan

suatu kegiatan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah misalnya anggaran yang dimiliki untuk menambah armada.

3. Kurangnya tercipta komunikasi antar pegawai  
Kompleknya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat, dan masing-masing aparat memiliki tugas yang cukup berat sehingga masing-masing aparat kurang konsisten dalam melakukan pengelolaan sampah dan berinteraksi, menciptakan komunikasi dan berkoordinasi dengan harmonis dan mendukung pelaksanaan tugas
4. Struktur Birokrasi yang kurang berkordinasi dengan instansi lainnya  
Kurangnya koordinasi yang tercipta antara Badan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah seperti melibatkan pihak Kecamatan, Lurah, RT, RW.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dari hasil penelitian mengenai sosialisasi pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terutama di Kecamatan Sijunjung dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi serta, struktur birokrasi maka sebagian besar informan memberikan pernyataan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal.
- b. Adapun hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sosialisasi

Perda No 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sijunjung antara lain :

- a. Kurangnya kemampuan dan profesionalisme SDM dalam menjalankan pelaksanaan tugas terutama dalam melakukan pengelolaan sampah
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan sampah karena kurangnya tercipta komunikasi antar pegawai
- c. Kurangnya sikap pegawai untuk berinteraksi, komunikasi dan koordinasi antar aparat dalam melakukan pengelolaan sampah
- d. Kurang kordinasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.

### **2. Saran-Saran**

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan hendaknya pihak Badan Lingkungan Hidup dapat menetapkan target kerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas.
- b. Hendaknya pihak Badan Lingkungan Hidup lebih memaksimalkan cara kerja dengan menggunakan pola-pola hubungan kerja yang sederhana dan berkesinambungan agar pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan bawahan mencapai hasil yang efektif dan efisien.
- c. Hendaknya pimpinan Badan Lingkungan Hidup



Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah.

- d. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan sampah, hendaknya pihak Badan lingkungan Hidup melibatkan Lurah, RT, RW serta masyarakat sehingga masalah sampah merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu social lainnya..* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. CV.Indra prahasta, Bandung.

Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu komunikasi dan Praktek*.

Bandung : RemajaRosdakarya

Moleong, Lexi J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Narwoko j dwi dan Bagong Suyanto.2011.*Sosiologi.Teks Pengantar dan Terapan* .Jakarta: Inu Kencana

Nimmo dan Jalaludin Rahkmat. 2000. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media* : Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant D, 2001, *Reinventing Indonesia Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia Elex Media Komputindo, Jakarta

Pasalong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2010. *TeoriAdministrasiPublik*. Bandung :Alfabeta

Sutaryo. 2005. *SosiologiKomunikasi*. Yogyakarta :ArtiBumiIntaran

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktik Mengkaji Masalah*

dan Kebijakan Sosial.  
Bandung : Alfabeta

Ruslan, Rosady. 2003. Publik  
Relation dan  
Komunikasi. Jakarta : Citra  
Adityabakti, PT.  
Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan  
Publik Teori dan Proses  
Edisi Revisi*. Yogyakarta :  
Media Pressindo

#### **SKRIPSI/ THESIS/JOURNAL**

Fustika, Rilla. 2014. Pemberdayaan  
Masyarakat dalam  
Pengelolaan Sampah Melalui  
Bank Sampah di Kota  
Padang. Skripsi. Padang :  
Universitas Andalas

Hendri, Restia. 2015. Implementasi  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup No 13  
Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pelaksanaan  
*Reduce, Reuse, dan Recycle*  
Melalui Bank Sampah di  
Kota  
Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru  
:Universitaas Riau

#### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup Republik  
Indonesia No 13 Tahun 2013  
Tentang Pengelolaan  
kebersihan

Peraturan Daerah No 08 tahun 2013  
tentang Pengelolaan Sampah  
Kabupaten Sijunjung.